



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 08 .AH.11.01 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2020-2025

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/B/KU-SJ/07/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN dan Kepengurusan DPP PAN Periode 2020-2025 Hasil Kongres V di Kota Kendari;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Jakarta, 02 September 2020
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik,
Rahmiyana, S.H., M.H.
NIP.19780115.200112.2.001

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2020-2025.**

PERTAMA Mengesahkan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Nasional Periode 2020-2025, dengan kedudukan kantor tetap di Rumah PAN, Jalan Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 09, tanggal 27 Februari 2020, tentang Akta Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025, yang dibuat di hadapan Muhammad Arfan, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Serang.

KEDUA : Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020, Tanggal 28 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2019 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020, tanggal 20 Desember 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASOKINA H. LAOLY





Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2020
Tanggal : 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2020-2025

I. MAJELIS PENASIHAT PARTAI (MPP)

Ketua	: M. Hatta Rajasa
Wakil Ketua	: Epyardi Asda
Sekretaris	: Tjatur Sapto Edy
Anggota	: Abdul Hadi Jamal
Anggota	: Alimin Abdullah
Anggota	: Miranti Abidin
Anggota	: Ahmad Farhan Hamid
Anggota	: Suwarno Adiwijoyo
Anggota	: Sabri Saiman
Anggota	: Sayuti Asyathri
Anggota	: Nurdiati Akma
Anggota	: Akmaludin Noor
Anggota	: Sulistiawati

II. BADAN PENGURUS HARIAN

1. Ketua Umum	: Zulkifli Hasan
2. Wakil Ketua Umum	: Asman Abnur
3. Wakil Ketua Umum	: Yandri Susanto
4. Wakil Ketua Umum	: Nasrullah Larada
5. Ketua	: Viva Yoga Mauladi
6. Ketua	: Bima Arya Sugiarto
7. Ketua	: Hafiz Tohir
8. Ketua	: Pangeran Khairul Saleh
9. Ketua	: Ambia B. Boestami
10. Ketua	: Yahdil Abdi Harahap
11. Ketua	: Darlis Pattalongi
12. Ketua	: Najib Quadratullah
13. Ketua	: Barnabas Yusuf Haura
14. Ketua	: Andi Yuliani Paris
15. Ketua	: Widdi Aswindi
16. Ketua	: Noviantika Nasution
17. Ketua	: Tuttur Sutikno
18. Ketua	: Mumtaz Rais
19. Ketua	: Haerudin
20. Ketua	: Irfan Nuranda Djafar
21. Ketua	: Desy Ratnasari
22. Ketua	: Zita Anjani
23. Sekretaris Jenderal	: Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno



- 24. Wakil Sekretaris Jenderal : Ibnu M. Bilaludin
- 25. Wakil Sekretaris Jenderal : Slamet Ariyadi
- 26. Wakil Sekretaris Jenderal : Romy Bareno
- 27. Wakil Sekretaris Jenderal : Surya Imam Wahyudi
- 28. Wakil Sekretaris Jenderal : Dian Islamiati Fatwa
- 29. Wakil Sekretaris Jenderal : Damayanti Hakim Tohir
- 30. Wakil Sekretaris Jenderal : Farazandi Fidinansyah
- 31. Wakil Sekretaris Jenderal : Fikri Yasin
- 32. Wakil Sekretaris Jenderal : Irvan Herman
- 33. Wakil Sekretaris Jenderal : Rosaline Irene Rumaseuw
- 34. Wakil Sekretaris Jenderal : Slamet Nur Achmad Effendy
- 35. Wakil Sekretaris Jenderal : Farah Puteri Nahlia
- 36. Wakil Sekretaris Jenderal : Denada Tambunan
- 37. Wakil Sekretaris Jenderal : Athari Gauthi Ardi
- 38. Wakil Sekretaris Jenderal : Sumarsono
- 39. Wakil Sekretaris Jenderal : Raji N. Sitepu
- 40. Wakil Sekretaris Jenderal : Erwin Izharuddin
- 41. Wakil Sekretaris Jenderal : Agus Sudarto
- 42. **Bendahara Umum : Totok Daryanto**
- 43. Bendahara : Nazaruddin Dek Gam
- 44. Bendahara : Farah Valensiyah Ingrid
- 45. Bendahara : Rizky Aljupri
- 46. Bendahara : Sri Uleng Bakri
- 47. Bendahara : Triyono Wahyudi
- 48. Bendahara : Tri Haryanti
- 49. Bendahara : Derry Purnamasari
- 50. Bendahara : Setyawati Molyana

Jakarta, 02 September 2020
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

MAHKAMAH PARTALAMANAT NASIONAL
Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum
Partai Politik,

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Yasonna, S.H., M.H.
NIP. 19780115 200112 2 001



- : Ali Taher Parasong
- : Yasin Kara
- : Irham Jafar Lan Putra
- : Abdul Hakam Naja
- : Bara K. Hasibuan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY